BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

2.1. Sejarah Perusahaan

Masa Penjajahan Belanda

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah daerah otonomi (Gemente) maupun swasta ataupun patungan antara pemerintah dan swasta.

Di Jawa Barat (Khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM), yang berdiri tahun 1905 pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah perusahan perseroan Gemenschappalijk Electicitiet Bedrijfvoor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan akte pendirian notaries Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen, no. 213 tanggal 31 Desember 1919.

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (1942 – 1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan di Jawa Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha wilayah kerja diseluruh pulau Jawa.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan sampai Sekarang

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saatnya penyerahaan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal pengelolaan dan penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPUPLN di Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tangerang.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara, menyebutkan bahwa status menjadi perusahaan listrik negara berdasarkan peraturan mentri PUJL No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1975 tentang Organisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan Perusahaan Listrik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dengan sebutan PT. PLN (PERSERO) Unit Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akta pendirian.

2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Perusahaan tempat Penulis melaksanakan kerja Praktik beralamatkan di Jl. Asia Afrika No. 63 Bandung 40111. Yang merupakan kantor pusat untuk distribusi Jawa Barat dan Banten.

2.3. Struktur Organisasi

Stuktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dibuat dengan tujuan agar para pegawai dapat bekerja dengan efektif, baik dan efisien. Mengenai Striktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat pada Mei tahun 2001 telah mengalami perubahan, guna efisiensi sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi. Struktur Organisasi yang baru terbentuk inipun tugas dan wewenangnya masih dalam tahap penyempurnaan, namun dari Struktur Organisasi berdasarkan SK Direksi PT. PLN No. 021/DIR/1987 tanggal 19 maret 1987 dan SK No. 093/DIR/1987 tanggal 29 Juli 1987 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemimpin Distribusi

   Merupakan pimpinan tertinggi pada PT. PLN (Persero) Distrtbusi Jawa Barat yang diangkat oleh direksi PT. PLN (Persero).

2. Deputi Pemimpin Bidang Perencanaan.
3. Deputi Pemimpin Bidang Konstruksi.
4. Deputi Pemimpin Bidang Kepengusahaan.
5. Deputi Pemimpin Bidang Keuangan.
6. Deputi Pemimpin Bidang Kepegawaian dan Administrasi.
7. Kontrol Interen.

Sedangkan Struktur Organisasi yang baru terbentuk adalah sebagai berikut :

1. General Manager
2. Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
3. Manajer Operasi.
4. Manajer Niaga.
5. Manajer Keuangan.
6. Manajer Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
7. Manajer Umum.
8. Manajer Teknologi Informasi.

Diantara General Manager dan Manajer terdapat Kepala Audit Internal terdiri :

1. Auditor Teknik.
2. Auditor Manajemen dan Keuangan.
3. Auditor Khusus.

2.4. Manajemen Organisasi



Pengadaan Pegawai

Pengadaan pegawai dilakukan untuk mengisi formasi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan perseroan. Pelamar yang telah memenuhi syarat dan telah lulus seleksi diwajibkan mengikuti program prajabatan dan selama mengikuti program prajabatan berstatus sebagai siswa. Pelamar yang menjalani program prajabatan dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus menjalani masa percobaan paling lama 3 bulan dan bersetatus sebagai pegawai dalam masa percobaan atau calon pegawai. Calon pegawai yang telah melewati masa percobaan dan memenuhi persyaratan yang dinyatakan Perseroan, dapat diangkat menjadi pegawai.

Jabatan Pegawai

Status kepegawaian terdiri atas pegawai dimana pegawai ditugaskaryakan ke instansi di luar Perseroan atas persetujuan pegawai yang bersangkutan. Setiap pegawai diangkat dalam jabatan tertentu, jenis jabatan terdiri atas jabatan struktural dan jabatan funsional.

Penempatan Pegawai

Penempatan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan Perseroan sesuai dengan formasi yang ditetapkan dan penempatan pegawai ini menjadi wewenang Perseroan sesuai dengan ketentuan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

merupakan jawaban terhadap berbagai perubahan yang terus bergulir, di sisi lain hal ini merupakan antisipasi berkelanjutan guna mempersiapkan PLN sebagai restrukturisasi korporat yang merubah bentuk organisasi menjadi lebih moderat dan terfokus berikut sebutan baru organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.